

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp12,7 T (876,7%)
▼ -35,8% (yoy)

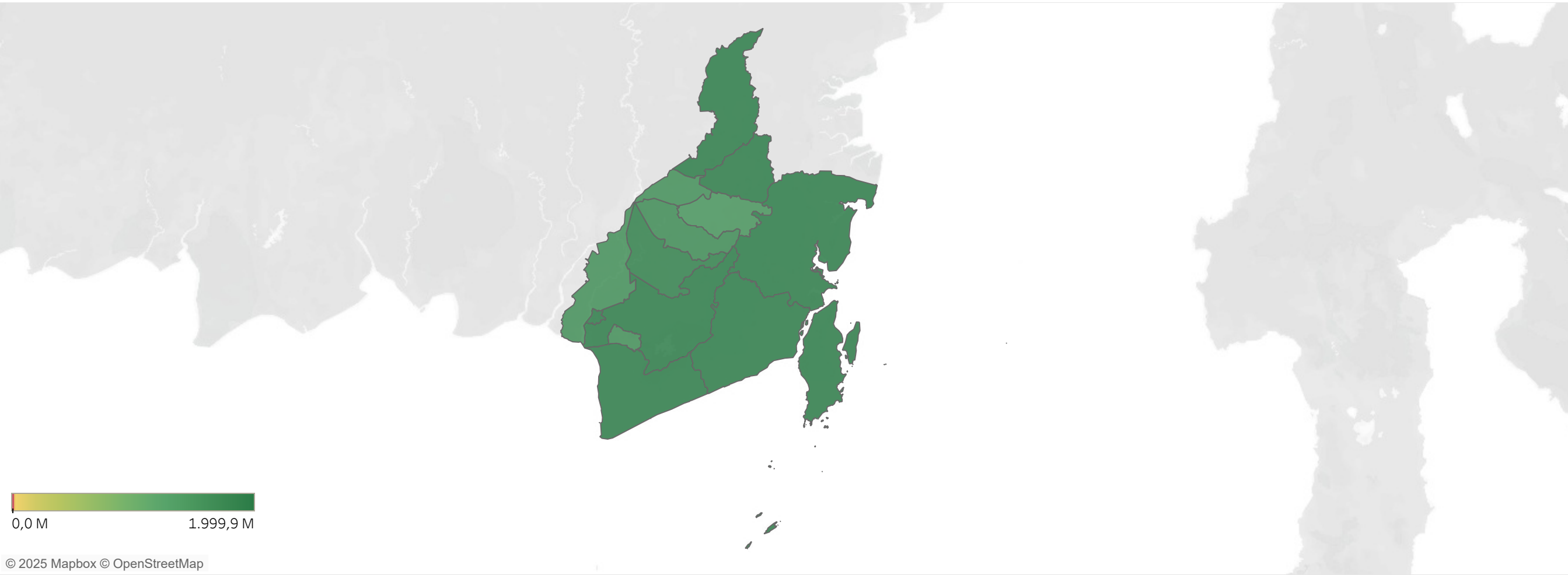
Belanja

Rp37,8 T (91,3%)
▲ 0,9% (yoy)

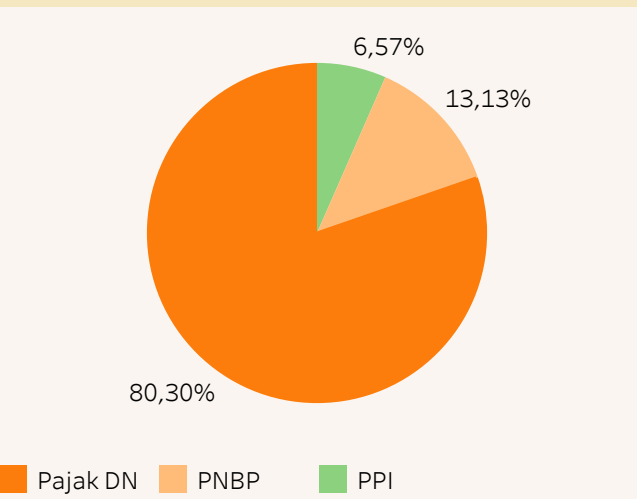
Defisit

Rp-25,2 T (63,0%)
▲ 41,8% (yoy)

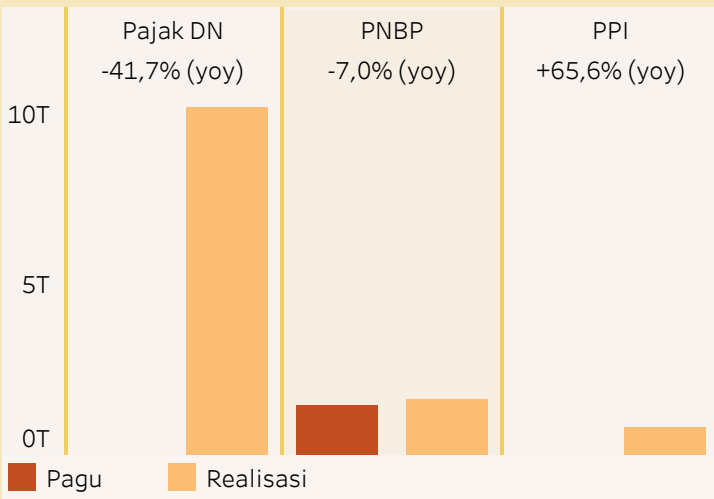
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



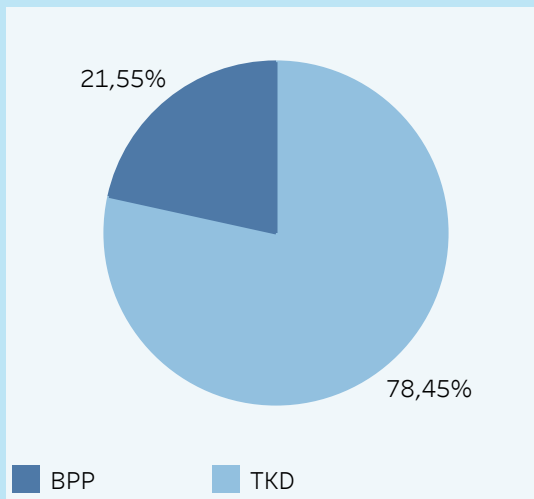
Persentase Komposisi Pendapatan



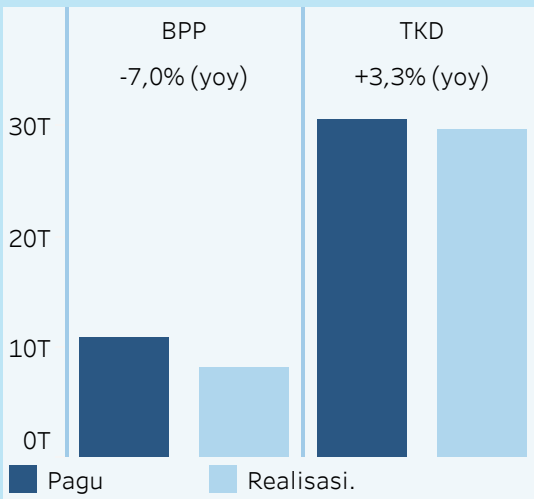
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



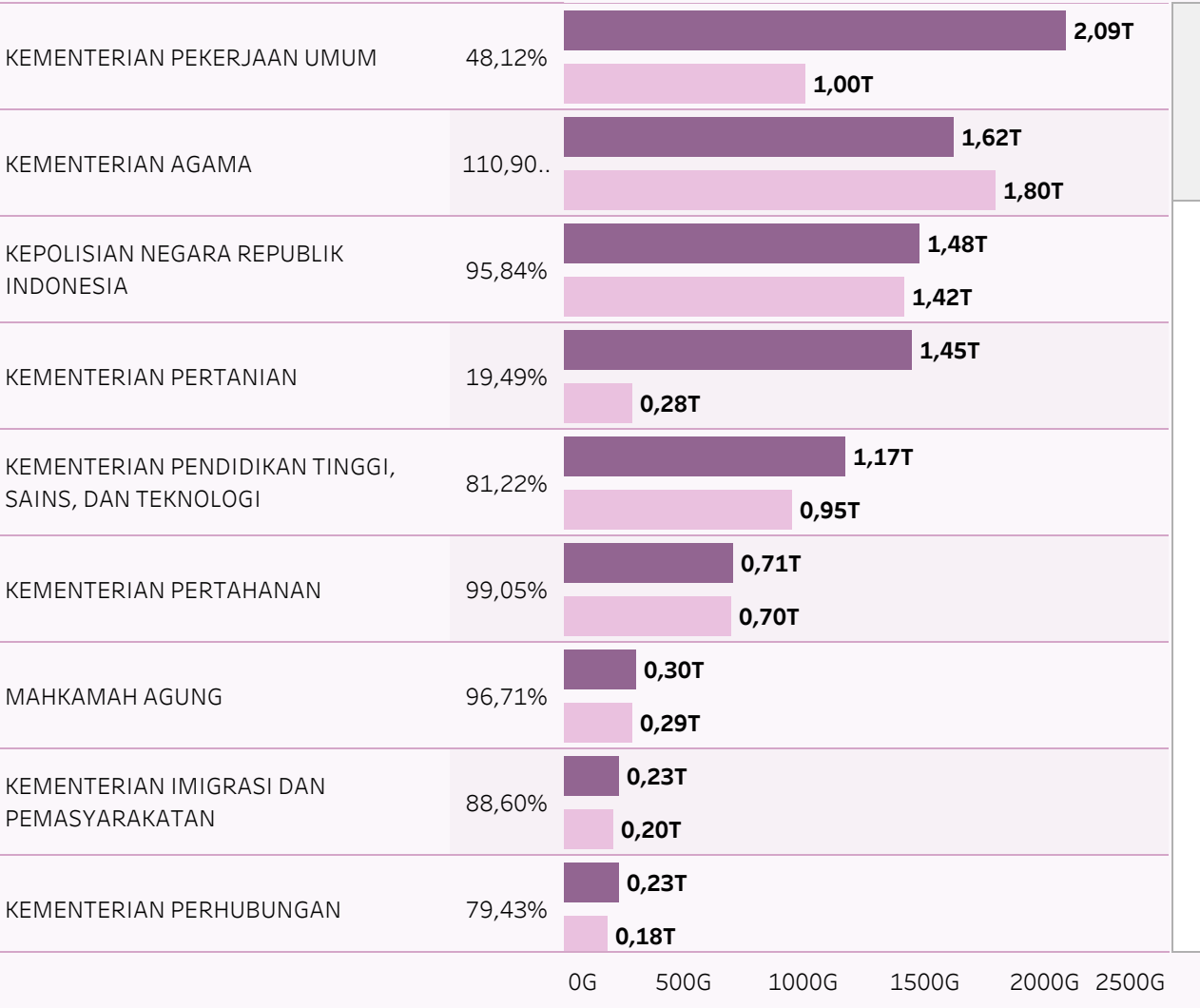
Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	19,7T	12,7 T	▼ 35,85%
Grand Total	19,7T	12,7 T	▼ 35,85%

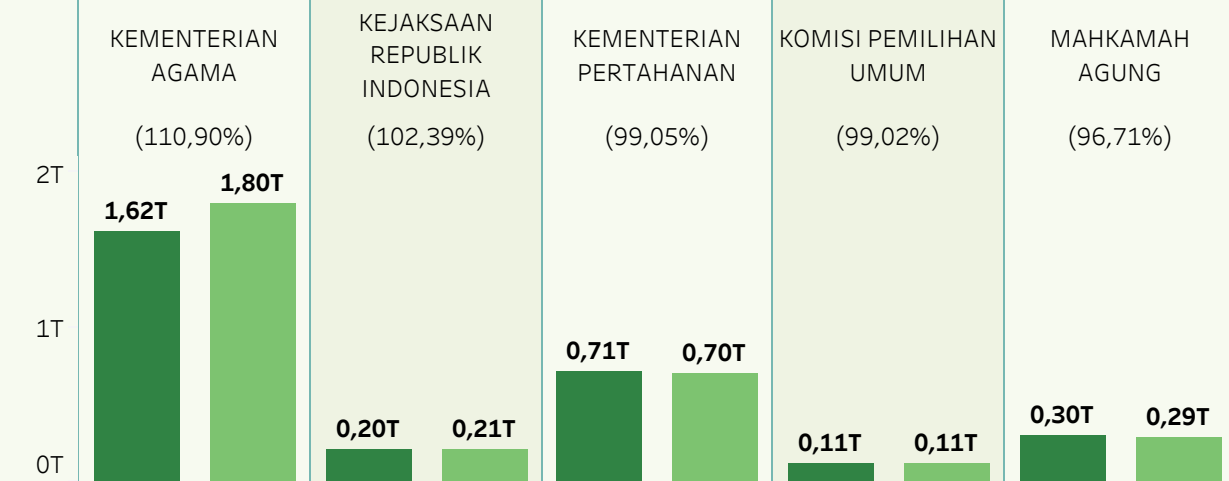
Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,7T	37,5T	90,0%	41,4T	37,8 T	91,3%	▲ 0,92%
Grand Total	41,7T	37,5T	90,0%	41,4T	37,8 T	91,3%	▲ 0,92%

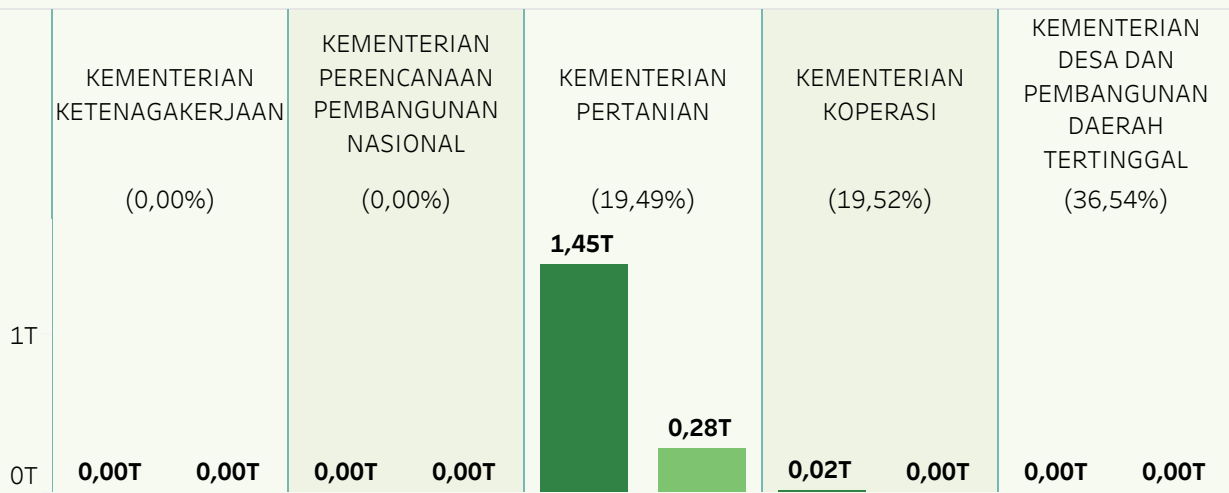
Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi



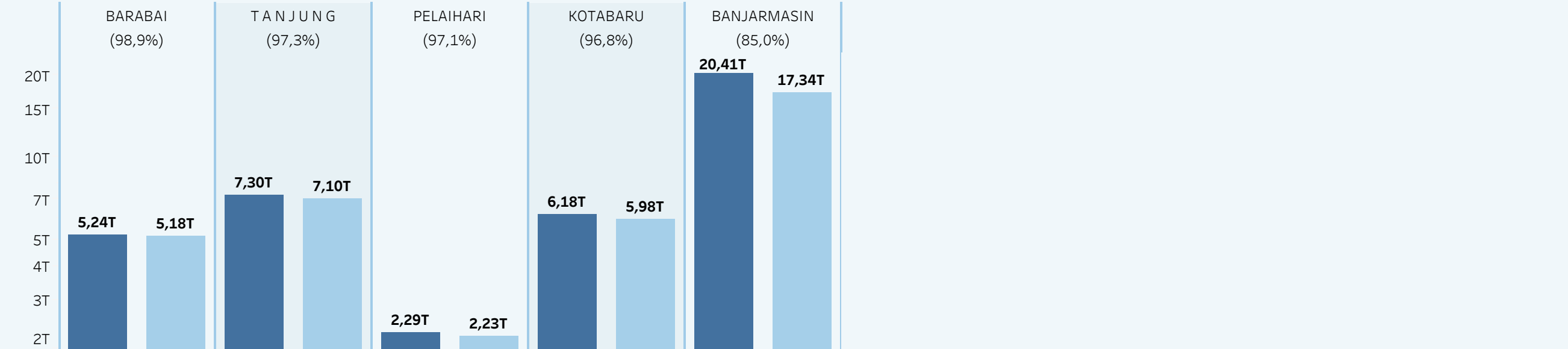
5 KL Persentase Realisasi Tertinggi



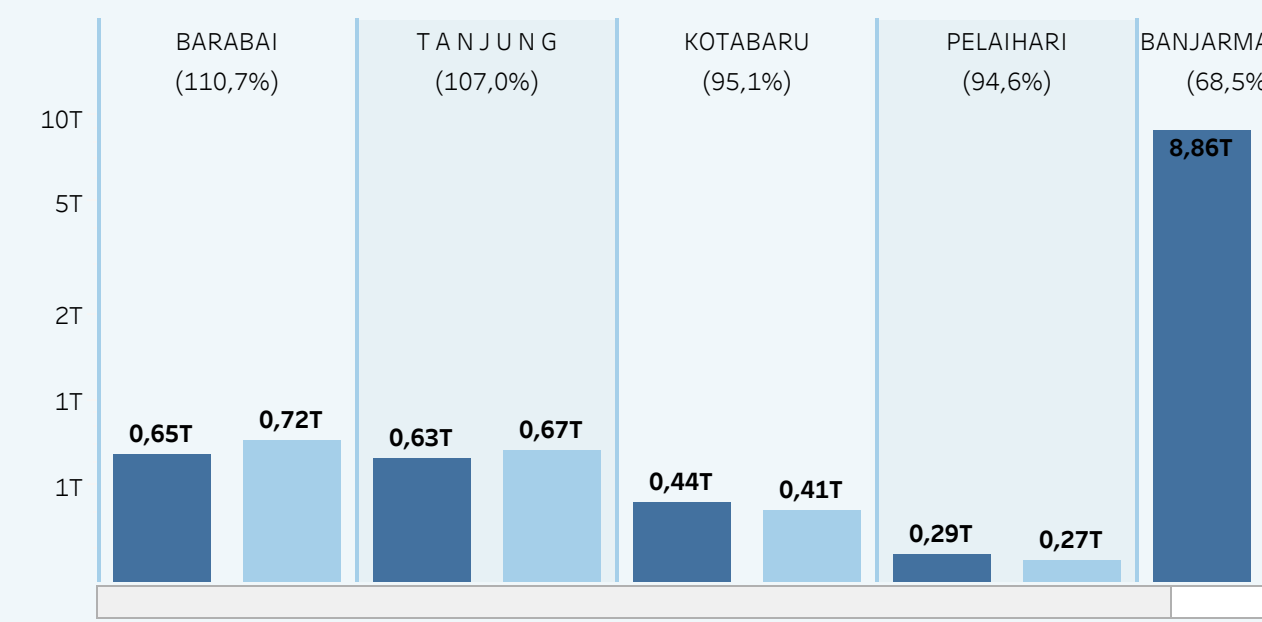
5 KL Persentase Realisasi Terendah



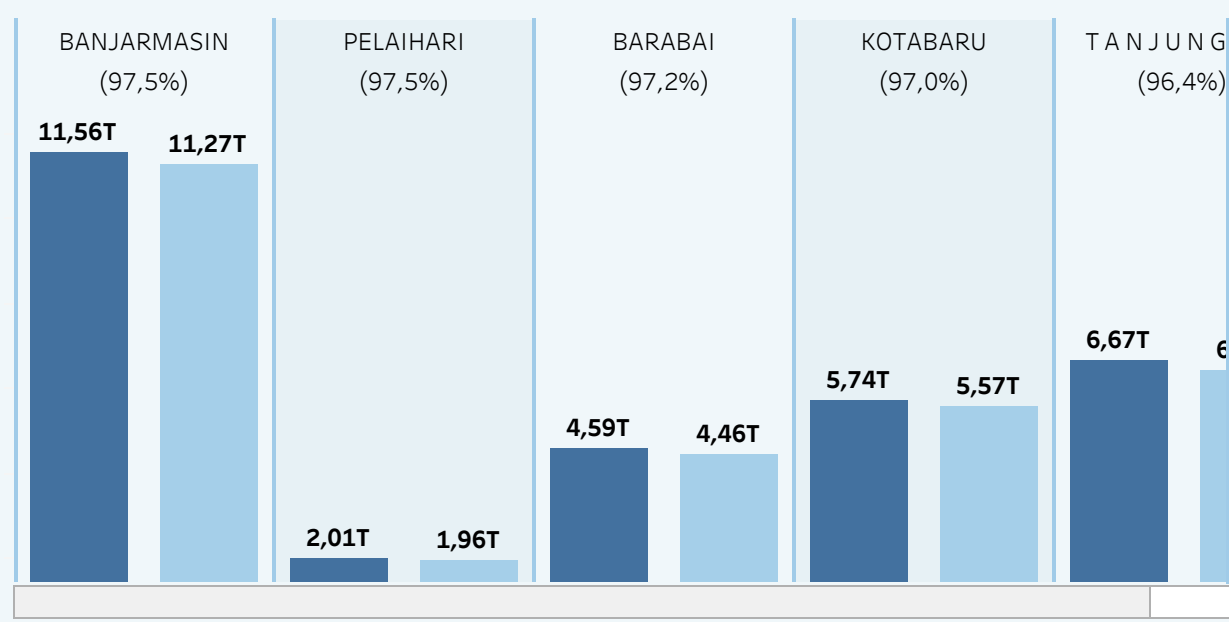
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d 12 Desember 2025

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp12,66 triliun (57,42%) dari target pendapatan negara sebesar Rp22,04 triliun, terkontraksi 35,85% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 49,88% (Rp 10,16 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 320,18% (Rp831,72 miliar), serta PNPB mencapai 116,90% (Rp1,66 triliun). Pendapatan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri (80,24%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d 12 Desember 2025

1. Kinerja Belanja Negara sebesar Rp37,8 triliun (91,4%) dari pagu Rp41,4 triliun, tumbuh 0,92% yoy. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 75,1% (Rp8,15 triliun) dari pagu Rp10,86 triliun, terkontraksi 7% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 97,14% (Rp29,68 triliun) dari pagu Rp30,55 triliun, tumbuh 3,3% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (78,45%).

2. Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi, Kementerian Pekerjaan Umum merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu Rp2,09 triliun, dengan realisasi mencapai 48,12% (Rp1 triliun). Kementerian Agama menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 110,90% (Rp1,62 triliun) dari pagu Rp1,80 triliun. Sementara, Kementerian Pertanian menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 19,49% (Rp0,28 triliun) dari pagu Rp1,45 triliun.

3. Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah, kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh Kementerian Agama dengan realisasi 110,90% (Rp1,62 triliun) dari pagu Rp1,80 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah oleh Kementerian Pertanian dengan realisasi 19,49% (Rp0,28 triliun) dari pagu Rp1,45 triliun. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional realisasi belanjanya masih 0%.

4. Kinerja KPPN, Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Barabai dengan realisasi sebesar 98,9% (Rp5,18 triliun) dari pagu Rp5,24 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 85,0% (Rp17,34 triliun) dari pagu Rp20,41 triliun.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Pemahaman aparat dan bendahara desa sebagai pemotong atau pemungut pajak tentang kewajiban perpajakan atas transaksi belanja yang menggunakan dana desa masih terbatas, terutama terkait aturan hukum, jenis objek pajak, prosedur pemotongan/pemungutan, pembuatan bukti potong, penyetoran, serta pelaporan SPT Masa, yang menyebabkan kendala seperti keterlambatan dan

kesalahan administrasi.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

Perlu peran proaktif dari Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kapasitas aparat dan bendahara desa melalui pelatihan berkala yang terstruktur, penyediaan pedoman praktis yang mudah dipahami, atau pendampingan langsung dari instansi perpajakan. Selain itu perlu adanya penguatan sistem administrasi desa agar proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dapat dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Sehubungan dengan batas *deadline* pengajuan SPM LS pada tanggal 23 Desember 2025, beberapa satker lingkup Kementerian Pekerjaan Umum RI di Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan alokasi tambahan pagu belanja pada akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar hampir Rp300 miliar, beberapa kontrak masih dalam proses lelang dan menunggu masa sanggah, sehingga sangat berpotensi terjadi keterlambatan dalam pengajuan SPM diluar batas waktu yang telah ditentukan.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Satker lingkup Kementerian PU di Provinsi Kalsel Perlu melakukan percepatan finalisasi proses pengadaan melalui penetapan jadwal lelang yang lebih ketat, peningkatan koordinasi antara PPK, ULP/UKPBJ, dan penyedia, serta melakukan penyisiran kembali kontrak-kontrak yang berpotensi selesai setelah batas waktu guna menentukan prioritas percepatan; dan tetap koordinasi dengan Kanwil DJPb terkait asistensi teknis termasuk jika diperlukan pengajuan dispensasi pengajuan SPM di luar batas waktu kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

HASIL ANALISIS TEMATIK REGIONAL

Analisis Tematik Regional

A | FLPP, Terdapat peningkatan unit yang dibangun periode sebelumnya 10.699 menjadi 10.982 unit, Peningkatan realisasi FLPP periode sebelumnya 9.821 unit menjadi 10.172 unit, peningkatan jumlah lokasi periode sebelumnya 676 lokasi menjadi 684, jumlah Kab./Kota yang ada program FLPP 13 Kab./Kota, dan nominal FLPP mengalami kenaikan periode sebelumnya sebesar Rp1.283.049.882.740,- menjadi Rp1.329.051.360.536,-

Kanwil DJPb Prov Kalsel menghadiri dan menjadi narasumber kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-PSN) di Kalimantan Selatan, pada tanggal 3 Desember 2025, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Prov Kalsel.

B | Giant Sea Wall, di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

C | Koperasi Desa Merah Putih, Progres realisasi anggaran masih belum terdapat realisasi dari alokasi pagu / perkiraan alokasi dana sebesar Rp 6.039 M

Progres Fase I

Jumlah desa dan kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Merah Putih dan jumlah koperasi desa dan kelurahan yang sudah berbadan hukum adalah sudah maksimal seperti periode berikutnya yaitu sebanyak 2.013

Progres Fase II

1. Jumlah koperasi yang sudah memiliki akun simkopdes (*microsite*) sebanyak 2.013
2. Jumlah koperasi yang sudah memiliki gerai (minimal 1 gerai) mengalami kenaikan periode sebelumnya 679 menjadi 770.
3. Jumlah keseluruhan gerai koperasi yang sudah aktif semula 770 menjadi 861.
4. Jumlah koperasi melakukan permohonan proposal bisnis semula 116 menjadi 117.
5. Jumlah permohonan proposal bisnis semula 369 menjadi 380.

D | Sekolah Rakyat, Realisasi Jumlah Sekolah Rakyat yang sudah berjalan tetap seperti periode sebelumnya sebanyak 3 SR. Saat ini, target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR.

E | Revitalisasi Sekolah, Jumlah target revitalisasi sekolah di provinsi Kalimantan Selatan adalah 311 sekolah dan seluruhnya telah dikontrakkan, yang terdiri dari Kementerian PU sebagai penanggungjawab 46 madrasah, Kementerian Dikdasmen sebagai penanggungjawab untuk Ditjen PDM 219 dan Ditjen Vokasi PKPLK 28 sekolah, Kementerian Transmigrasi sebagai penanggungjawab 18 sekolah.

Progres target 46 madrasah, Kementerian PU menargetkan 14 madrasah selesai tahun ini dan sisanya 32 madrasah ditargetkan selesai tahun depan melalui skema *multi years contract* (MYC).

Progres target 18 sekolah, Kementerian Transmigrasi menargetkan seluruhnya selesai tahun ini.

Progres target 247 sekolah, Kementerian Dikdasmen.

F | SMA Unggul Garuda, Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Telah dilakukan peresmian SMA Garuda Transformasi pada SMAN Banua, oleh Menteri Ekonomi Kreatif pada tanggal 8 Oktober 2025. Peresmian SMA Garuda di Kalsel ini merupakan bagian dari peluncuran serentak di 16 Sekolah se-Indonesia yang terdiri dari 4 sekolah baru dan 12 sekolah transformasi.

G | Ketahanan Pangan, Terdapat kenaikan realisasi anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan semula Rp647,41 M (35,01%) menjadi Rp648,17 M (35,05%) dari pagu sebesar Rp1,85 T.

H | Ketahanan Energi, Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

Isu dan Rekomendasi Tematik Regional

A | Isu FLPP, meliputi:

Keterbatasan kewenangan sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta tidak tersedianya baseline penanganan bencana sejak 2021, menyebabkan skema yang ada tidak mampu mengakomodasi kebutuhan MBR.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

Perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga guna menyusun kembali baseline kebutuhan penanganan bencana yang terintegrasi dengan perencanaan perumahan MBR. Pemerintah pusat dapat menyiapkan pedoman teknis yang lebih fleksibel agar daerah tetap dapat berperan optimal dalam penyediaan hunian layak bagi MBR.

C | Isu *Giant Sea Wall*, meliputi:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*

D | Rekomendasi *Giant Sea Wall*, diperlukan:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*

E | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

Pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih masih terkendala mekanisme Permendes 10 Tahun 2025, terutama terkait skema yang menempatkan dana desa sebagai jaminan terakhir sebesar 30% dari pagu desa. Hal ini menjadikan kekhawatiran desa dalam penggunaan dana desa, yang juga bersinggungan dengan Bank Himbara.

F | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

Diperlukan langkah penyempurnaan regulasi melalui koordinasi antara Kemendes PDTT, Kemenkeu, dan Himbara guna meninjau kembali skema penjaminan agar lebih proporsional serta tidak membebani desa. Pemdes dapat diberikan alternatif skema mitigasi risiko, seperti penjaminan berlapis melalui

lembaga penjamin, penguatan tata kelola koperasi, atau penahapan penggunaan dana desa berbasis kinerja.

G | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Pemda merasa keberatan untuk mengalokasikan dana untuk Kajian AMDAL yang memerlukan biaya yang tidak sedikit (pembuatan kajian AMDAL diperkirakan mencapai Rp 1 Miliar), dalam rangka Penyediaan dan pembangunan Sekolah Rakyat.

H | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Pemda agar melakukan optimalisasi sumber pendanaan melalui skema *cost-sharing* antara Pemda dan Kementerian terkait. Selain itu, Pemda dapat mempertimbangkan kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema KPBU non-komersial atau *corporate social responsibility* (CSR) yang tetap memenuhi ketentuan lingkungan hidup.

I | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Berdasarkan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik), terdapat sekitar 800 sekolah di Kalsel yang mengalami kerusakan seperti atap roboh dan lantai amblas. Dari jumlah tersebut, sampai dengan saat ini baru 311 sekolah yang terdaftar untuk dilaksanakan program revitalisasi sekolah.

J | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Diperlukan langkah percepatan pendataan dan verifikasi lapangan oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota guna memastikan seluruh sekolah dengan kerusakan prioritas tinggi segera masuk dalam perencanaan revitalisasi. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk pemutakhiran data Dapodik secara berkala serta mendorong percepatan usulan sekolah melalui skema pembiayaan yang telah ditetapkan atau pembiayaan alternatif lainnya.

K | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melahirkan generasi muda unggul yang '*Go Internasional*' dan kembali ke daerah untuk membangun Kalimantan Selatan.

L | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Perlu disiapkan program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan internasional bagi peserta didik berprestasi agar mampu mengembangkan wawasan global dan kompetensi internasional. Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pembinaan dan reintegrasi bagi lulusan Sekolah Garuda agar potensi dan pengetahuan yang mereka peroleh di luar daerah maupun luar negeri dapat dikonstruksikan kembali untuk kemajuan Kalimantan Selatan.

M | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Terdapat kemungkinan penggunaan mekanisme RPATA untuk 17 Kontrak dan potensi batal kontrak sebanyak 7 kontrak. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan batas akhir penyelesaian administrasi pada tanggal 15 Desember 2025.

N | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Diperlukan percepatan penyelesaian administrasi melalui koordinasi intensif antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan seluruh penyedia dan pejabat pelaksana kontrak sebelum batas waktu 15 Desember 2025.

O | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat 2 pembangkit bio energi berjenis biomassa dengan jaringan *off-grid* (tidak terhubung langsung dengan jaringan umum) di Kabupaten Tabalong dengan total kapasitas 2,6 MW, yaitu: Pembangkit pertama dikelola oleh PT. Cakung Permata Nusa I (ATA) di desa Kasiau dengan kapasitas 1,1 MW; dan Pembangkit kedua dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari di desa Hayub dengan kapasitas 1,6 MW.

P | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi integrasi lokal, misalnya melalui penyediaan jaringan distribusi *mini-grid* atau skema *off-taker* lokal, agar listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri di sekitar lokasi.

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Terdapat kenaikan jumlah SPPG semula 189 menjadi 195, jumlah *supplier* semula 228 menjadi 248, dan penerima manfaat semula 495.487 menjadi 503.385 penerima.

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

Pemkab Hulu Sungai Selatan menargetkan pembangunan sebanyak 18 SPPG terpencil yang akan tersebar di berbagai wilayah kabupaten. Pemerintah Daerah telah bertemu dengan para investor untuk merealisasikan rencana ini, dan 6 SPPG yang akan segera beroperasi dalam waktu dekat. Setiap SPPG terpencil ini diproyeksikan memiliki kuota layanan sekitar 350 hingga 400 porsi makanan bergizi.

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

Pemkab Hulu Sungai Selatan perlu memastikan kesiapan infrastruktur, pembiayaan, serta koordinasi lintas sektor agar target pembangunan 18 SPPG terpencil dapat terealisasi secara efektif. Pemerintah daerah tetap perlu memperkuat mekanisme pengawasan, ketersediaan tenaga pengelola, dan rantai pasok bahan pangan bergizi agar setiap SPPG mampu memenuhi proyeksi layanan 350–400 porsi per hari.